

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan kegiatan bisnis salah satu ialah bagaimana meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja perusahaan karena manajemen selalu menghadapi kelangkaan dalam pengadaan sumber daya berupa tenaga, serta sarana dan prasarana. Permasalahan ini dapat dikurangi melalui kehadiran atau keberadaan suatu kelompok manajemen puncak yang memiliki ketangguhan dalam menentukan tujuan filsafat, strategi akbar dan budaya organisasi. Permasalahan juga dapat dikurangi dengan adanya manajemen operasional yang tangguh dan hadal. Strategi akbar dan strategi induk harus dirinci menjadi strategi dasar sebagai pedoman dan pegangan dalam menyelenggarakan semua jenis dan bentuk kegiatan operasional. Dengan kata lain, apakah perusahaan dikelola dengan efisien atau tidak, dan apakah perusahaan mampu menampilkan produktivitas kerja yang tinggi atau tidak akan terlihat dalam penyelenggaraan seluruh aktivitas yang sifatnya operasional (Siagian,1996:215).

Seiring dengan perkembangan jaman, dalam Instansi Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah, juga harus meningkatkan kinerja manajemen operasionalnya. Dalam pencapaian tujuannya, tidak beda jauh dengan perusahaan, Instansi Pemerintah pun perlu memperlihatkan kegiatan operasionalnya guna mempertanggungjawabkan atas segala kegiatan yang sifatnya operasional. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuannya berjalan dengan baik. Dalam hal ini jika sebuah instansi pemerintah manajemen operasionalnya baik, maka akan baik pula dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun tanggung jawabnya kepada pemerintah.

Melihat begitu pentingnya penyelenggaraan aktivitas yang sifatnya operasional, maka diperlukan instrumen yang mampu memberikan penilaian dan jaminan akan efektifnya suatu kegiatan operasional, yaitu “Audit Operasional”. Audit Operasional dimaksudkan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan tujuan memberikan rekomendasi agar pengelolaan kegiatan, aktivitas, dan program yang dilakukan secara ekonomis efisien dan efektif (BPKP,1993:5).

Audit ini mendapat informasi bagi manajemen Instansi Pemerintah mengenai problema yang dihadapi dalam melakukan kegiatan operasional yang memerlukan perbaikan guna mencapai tingkat operasi yang lebih efisien dan ekonomis. Jadi sebenarnya audit operasional berorientasi ke usaha peningkatan efisiensi operasi/aktivitas manajemen. Sehingga nantinya dengan adanya audit operasional, manajemen akan bisa menilai apakah kegiatan yang sifatnya operasional yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah tersebut sudah efektif, efisien, dan ekonomis. Dalam hal ini, yang memiliki kewenangan untuk melakukan Audit Operasional terhadap Instansi Pemerintah adalah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

BPKP adalah sebuah lembaga Pemerintahan non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. BPKP memiliki tugas melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan serta penyelenggaraan akuntabilitas didaerah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. BPKP diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk melaksanakan Audit Operasional terhadap Instansi Pemerintah baik pusat maupun daerah dan kemudian melaporkannya kepada pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik mengambil judul “PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT OPERASIONAL TERHADAP INSTANSI PEMERINTAH PADA KANTOR PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) KOTA PADANG”.

## **1.2 Rumusan masalah**

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut yaitu bagaimana langkah-langkah pelaksanaan audit operasional pada instansi pemerintahan, peran auditor dan pengendalian mutu dalam pelaksanaan audit operasional di Kantor Perwakilan BPKP Kota Padang.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan berupa hal berikut :

- 1) Mengetahui bagaimana Prosedur pelaksanaan Audit Operasional yang benar terhadap Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan BPKP Kota Padang.
- 2) Mengetahui bagaimana peran auditor di kantor Perwakilan BPKP Kota Padang.
- 3) Mengetahui Quality Control atau pengendalian mutu yang digunakan pada pelaksanaan Audit Operasional.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini berguna bagi beberapa pihak, seperti pembaca, universitas dan perusahaan atau instansi. Kegunaan penelitian ini bagi pembaca berupa dapat

dipahaminya dan penambahan pengetahuan mengenai audit operasional terhadap instansi pemerintahan.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Laporan tugas akhir ini terdiri dari lima bab dimulai dari BAB 1 pendahuluan hingga BAB V kesimpulan. Berikut rincian sistematika penulisan laporan tugas akhir ini.

BAB I : Bab ini merupakan bab awal dari penulisan laporan ini, dimana berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini berisi teori-teori pendukung yang berkaitan dengan laporan penelitian yang dibuat.

BAB III : Bab ini menjelaskan bagaimana prosedur yang dilakukan dalam sebuah penelitian, dimulai dari penentuan topik penelitian, hingga terciptalah sebuah laporan penelitian.

BAB IV : Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V : Bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan laporan penelitian yang berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran untuk penelitian selanjutnya agar memperoleh hasil yang lebih baik..

